



RANCANGAN PERUBAHAN RPJMD KALTIM TAHUN 2019-2023 & RKPD KALTIM TAHUN 2022

Oleh :
PROF. DR. IR. H. M. ASWIN, MM
Kepala Bappeda Provinsi Kaltim

Disampaikan pada :
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021



@ bappedakaltim



bappeda.kaltimprov.go.id

LATAR BELAKANG PERUBAHAN RPJMD KALTIM 2019-2023



Kebijakan Nasional :

- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yang dalamnya memuat Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah



Pandemi Covid-19 :

- Berpengaruh besar pada kinerja perekonomian dan keuangan daerah.
- Perubahan sosial yang berimplikasi kepada tingkat kesejahteraan masyarakat (penurunan pencapaian IPM, peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran)



Evaluasi RPJMD :

Beberapa target indikator kinerja utama daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan pertimbangan dampak Covid-19 yang mempengaruhi kinerja perekonomian dan keuangan daerah, sehingga target akhir kinerja RPJMD perlu disesuaikan



@ bappedakaltim

bappeda.kaltimprov.go.id

SUBSTANSI PERUBAHAN RPJMD

BAB I

Penajaman latar belakang dengan kondisi pembangunan saat ini termasuk relevansi peraturan perundangan terbaru

BAB II

Memperbaharui data kinerja ter-update

BAB III

Memperbaharui proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dengan asumsi *refocusing* anggaran

BAB IV

Update permasalahan pembangunan dan isu strategis yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kaltim

BAB V

Memperbaharui kebijakan, khususnya tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk target capaian indikator pembangunan

BAB VI

Penajaman arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah

BAB VII

Implementasi program hasil pemetaan PMDN 90/2019 termasuk penyesuaian indikator dan target pembangunan Kaltim

BAB VIII

Memperbaharui indikator kinerja daerah terutama target yang dilakukan penyesuaian

BAB IX

Memperbaharui kaidah pelaksanaan



@bappedakaltim



bappeda.kaltimprov.go.id

Visi : Berani Untuk Kaltim Berdaulat

Berani

Pemerintah mempunyai keberanian, tekad dan komitmen yang kuat untuk memaksimalkan kewenangan yang dimiliki sesuai peraturan perundangan untuk mensejahterakan masyarakat.

Berdaulat

Kalimantan Timur memiliki **kemantapan** dalam pemerintahan, hukum dan pelayanan publik

Kalimantan Timur mampu mewujudkan **kemandirian** dan dalam ekonomi kerakyatan dan ketercukupan kebutuhan dasar

Kalimantan Timur mampu mewujudkan **kemandirian** dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

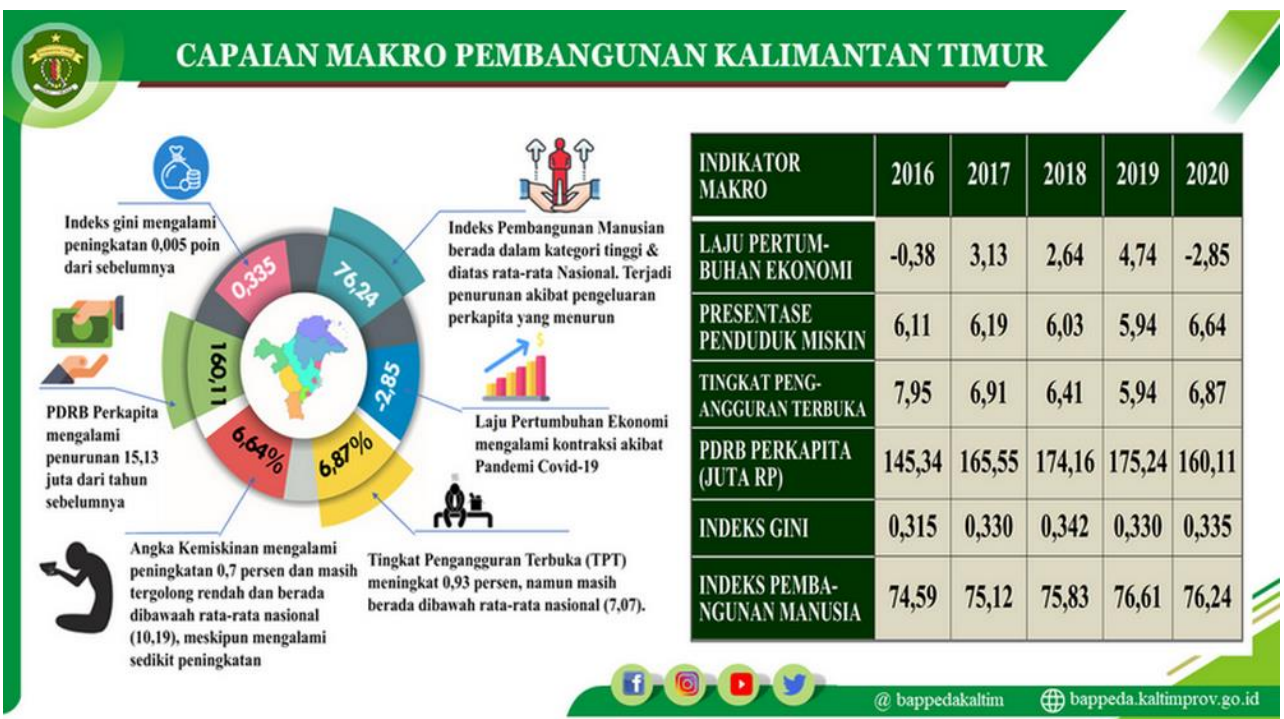
Kalimantan Timur mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter, berkualitas dan memiliki **daya saing**



@bappedakaltim



bappeda.kaltimprov.go.id





TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022



TEMA

Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN

TAHUN 2022

PRIORITAS PEMBANGUNAN

- 01 Peningkatan Ketahanan Kesehatan Masyarakat Serta Reformasi Sistem Pendidikan Keterampilan Yang Mendukung Daya Saing SDM
- 02 Penguatan Pelaku dan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Dalam Rangka Peningkatan Daya Beli Masyarakat
- 03 Peningkatan Kemudahan Berinvestasi Di Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam Terbarukan Dalam Rangka Penguatan Ekspor Komoditi Unggulan
- 04 Penguatan Konektivitas Antar Daerah, Kawasan dan IKN
- 05 Percepatan Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Dan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik



@bappedakaltim

bappeda.kaltimprov.go.id

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Tema

“Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat”

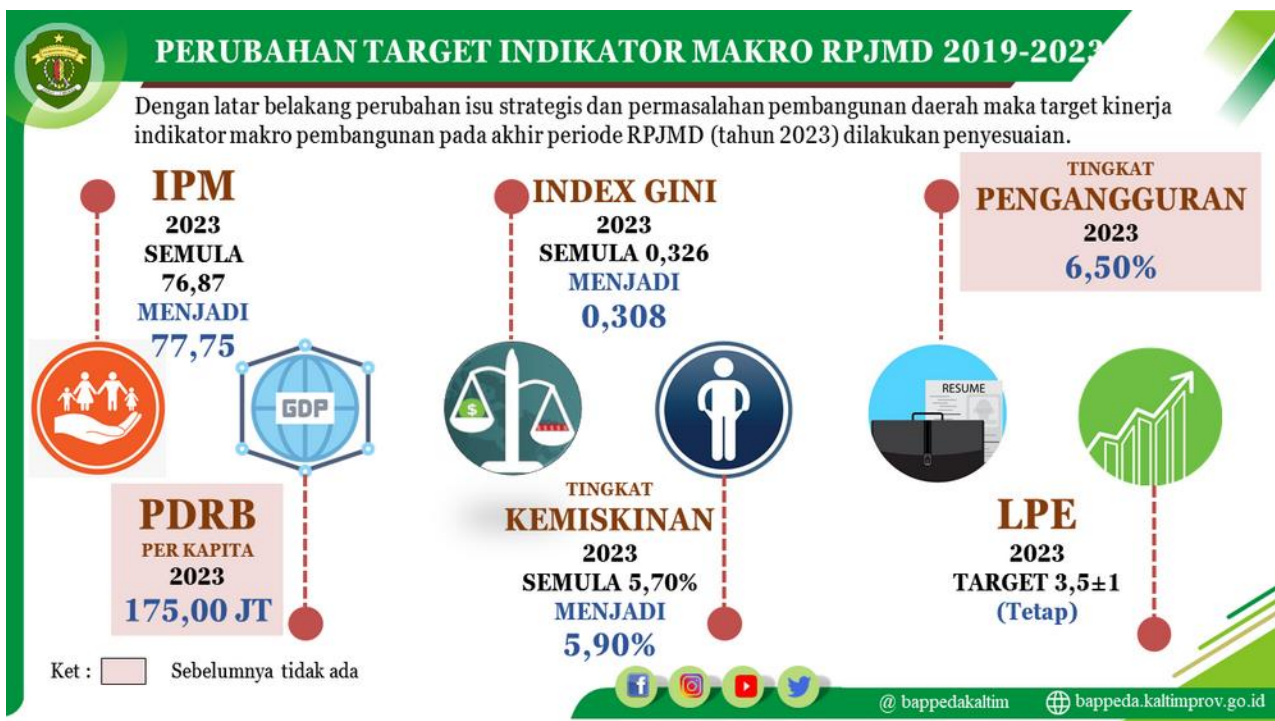
Prioritas Pembangunan

- 1 Pengembangan Angkatan Kerja Yang Kompetitif Dan Berdaya Saing
- 2 Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Kewirausahaan Masyarakat
- 3 Peningkatan Produktivitas Kawasan Industri Pengolahan
- 4 Penguatan Ekspor Komoditi Unggulan Yang Memiliki Nilai Tambah Tinggi
- 5 Pemerataan Dan Pemantapan Konektivitas Antar Daerah Dan Kawasan Pendukung IKN
- 6 Pengembangan Kemandirian Birokrasi Untuk Kebijakan Publik Yang Berpihak Pada Kedaulatan Daerah



@bappedakaltim

bappeda.kaltimprov.go.id



RKPD KALTIM TAHUN 2022

CAPAIAN MAKRO KABUPATEN KOTA SE KALTIM 2020

No.	Kabupaten/Kota	IPM	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pendapatan per kapita (Juta Rp)
1.	Paser	72,04	9,23	4,52	-4,67	148,63
2.	KUBAR	71,19	9,29	4,97	-3,09	183,84
3.	KUKAR	73,59	7,31	5,70	-6,44	185,65
4.	KUTIM	73,00	9,55	5,45	-6,90	296,16
5.	Berau	74,71	5,19	5,08	-5,76	148,90
6.	PPU	71,41	7,36	6,22	-3,31	55,70
7.	MAHULU	67,09	11,44	3,49	-0,67	104,60
8.	Balikpapan	80,01	2,57	9,00	-2,04	155,98
9.	Samarinda	80,11	4,76	8,26	-2,63	75,04
10.	Bontang	80,02	4,38	9,46	-4,61	312,15
	KALTIM 2020	76,24	6,10	6,87	-2,85	160,11



@bappedakaltim

bappeda.kaltimprov.go.id



SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2022

	2020	2021*	2022*
Pertumbuhan Ekonomi (% YoY)	-2,1	5,0	5,4 – 6,0
Investasi	-4,9	4,3	6,5 – 7,2
Ekspor	-7,7	7,3	6,5 – 7,1
Industri Pengolahan	-2,9	5,2	5,6 – 6,3
Jasa-Jasa	-1,4	6,0	6,2 – 6,9
Stabilitas Makro-Ekonomi			
Inflasi (% akhir periode)	1,7	2,5	2,0 – 4,0
Nilai Tukar (USD/IDR)	14.577	14.450	13.900–15.000
Defisit Transaksi Berjalan (% PDB)	-0,5	-1,0	(1,6) – (1,7)
Cadangan Devisa (USD Miliar)	135,9	136,1	138,2 – 141,4

RKP 2022

RKPD 2022

	2022*
Laju Pertb. Ekonomi (%)	3,5±1
Inflasi	2,0 – 3,0
Investasi (trilyun Rp)	47,15
Indeks Pemb.Manusia	77,25
Indeks Gini	0,313
Tingkat Kemiskinan (%)	6,00
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,75

*) Angka Perkiraan Bappeda Prov. Kaltim

Sumber: BPS, BI, Kemenkeu, Perkiraan Bappenas

*) Angka Perkiraan Bappenas



@bappedakaltim

bappeda.kaltimprov.go.id

TARGET PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2022

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	
		2021	2022
Misi 1. BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS			
Tujuan 1: Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berakarakter dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	76.75	77.25
Tujuan 2	Tingkat Kemiskinan (%)	6.05	6.00
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.81	6.75
Misi 2. BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN			
Tujuan 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1.00	3,5±1
	PDRB per Kapita (Juta Rp)	167.5	170
	LPE Non Migas dan Batubara (%)	1.5	2
	Nilai Tukar Petani	101	103
MISI 3. BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN			
Tujuan 4 : Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0.313	0.313
MISI 4. BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN			
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75.95	81.61
MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK			
Tujuan 6 : Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (71,50)	B (72,50)















@bappedakaltim

bappeda.kaltimprov.go.id

TARGET MAKRO PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR – KABUPATEN KOTA TAHUN 2022

KALTIM

KABUPATEN KOTA

INDIKATOR MAKRO	TARGET	INDIKATOR MAKRO	PASER	KUBAR	KUKAR	KUTIM	BERAU	PPU	MAHULU	BPN	SMD	BTG
 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	3,5±1	 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	4,32	2,40	5,65	7,84	5,30	3,52	6,30	5,00	1-2	2,50
 PRESENTASE PENDUDUK MISKIN	6,00	 PRESENTASE PENDUDUK MISKIN	8,00	13,29	6,90	8,95	4,30	7,01	10,02	2,42	4,31	4,03
 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	6,75	 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	3,45	5,08	4,94	5,38	4,90	5,59	4,60	9,00	5,41	8,70
 PDRB PERKAPITA (JUTA RP)	170,00	 PDRB PERKAPITA (JUTA RP)	180,77	186,00	209,28	354,90	154,10	59,73	104,17	184,17	81,59	327,00
 INDEKS GINI	0,313	 INDEKS GINI	0,300	0,300	0,290	0,300	0,295	0,300	0,320	0,300	0,300	0,320
 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	77,25	 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	73,65	71,75	75,34	75,76	75,50	72,27	69,60	80,00	81,44	81,40



@ bappedakaltim

bappeda.kaltimprov.go.id

PERKIRAAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2021-2022

KODE REK	KOMPONEN PENERIMAAN	APBD 2021 (Juta Rp)	RKPD 2022 (Juta Rp)	Proyeksi RPJMD 2022 (Juta Rp)	KODE REK	URAIAN	APBD 2021 (Juta Rp)	RKPD 2022 (Juta Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	9.552.946	11.001.164	12.136.620	5	BELANJA	11.616.186	11.001.164
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.396.943	5.986.211	7.037.700	5.01	BELANJA OPERASI	5.435.616	5.593.474
4.1.01	Pajak Daerah	4.260.000	5.042.645	6.015.000	5.01.01	Belanja Pegawai	2.331.962	2.342.772
4.1.02	Retribusi Daerah	17.841	20.962	23.513	5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.812.706	3.342.772
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	243.642	149.178	174.328	5.01.05	Belanja Hibah	274.429	153.042
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	875.460	773.426	824.859	5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	16.518	9.775
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.143.276	5.002.355	5.086.179	5.02	BELANJA MODAL	1.984.395	1.248.005
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.180.730	5.002.355	5.086.179	5.02.01	Belanja Modal Tanah	38.956	51.078
4.2.01.01	Dana Perimbangan	4.143.276	5.002.355	5.048.725	5.02.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	492.268	227.116
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	2.620.455	3.479.534	3.525.905	5.02.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	681.717	349.573
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	856.333	856.333	856.333	5.02.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, & Irigasi	757.752	594.623
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAU) Fisik	318.457	318.457	318.457	5.02.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.702	1.615
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	348.030	348.030	348.030	5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	251.933	251.933
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	37.454	-	37.454	5.03.01	Belanja Tidak Terduga	251.933	251.933
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	12.727	12.599	12.599	5.04	BELANJA TRANSFER	3.944.242	3.907.752
01.03.01	Hibah	12.727	12.599	12.740	5.04.01	Belanja Bagi Hasil	2.240.000	2.607.752
01.03.04	Dana penyesuaian & Otonomi Khusus***	0	0	0	5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.704.242	1.300.000
01.03.05	Bantuan Keuangan & Provinsi atau Pemda lainnya	0	0	0				



@ bappedakaltim

bappeda.kaltimprov.go.id

KAPASITAS RIIL TAHUN 2021-2022

No	URAIAN BELANJA	APBD 2021 (Rp)	RKPD 2022 (Rp)
I. BELANJA MENGIKAT			
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.002.670.888.261	1.002.670.888.261
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS + Perkiraan TPP	938.045.736.426	938.045.736.426
3.	Belanja Penerimaan KDH/WKDH & DPRD	38.011.137.251	38.011.137.251
4.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif KDH/WKDH & DPRD	13.860.000.000	13.860.000.000
5.	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	8.095.413.852	8.095.413.852
6.	Insentif Pemungut Pajak	129.632.250.000	147.852.217.000
7.	Belanja Air	7.433.161.544	7.433.161.544
8.	Belanja Listrik	38.576.623.064	38.576.623.064
9.	Belanja Telepon	1.761.372.414	1.761.372.414
10.	Belanja Internet	33.284.046.964	33.284.046.964
11.	Belanja Pajak Kendaraan	2.866.989.800	2.866.989.800
12.	Dana Alokasi Khusus (DAK) (Didik, Dinkes, RSUD, DPTPH, Perpustakaan DKP)	666.487.302.000	666.487.302.000
13.	Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR)	171.536.608.000	171.536.608.000
14.	Dana Insentif Daerah (DID)	37.454.311.000	0
15.	Belanja Pajak Rokok (Dinkes, Satpol PP)	60.000.000.000	69.643.500.000
16.	BLUD	700.150.000.000	651.500.000.000
17.	Bantuan Keuangan kepada Parpol/Belanja Hibah kepada Parpol	2.381.863.838	2.381.863.838
18.	Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Kab./Kota (BPKAD)	1.661.741.500.000	1.300.000.000.000
19.	Bantuan Keuangan ke Desa	42.500.000.000	42.500.000.000
20.	Belanja Tidak Terduga	251.933.363.342	251.933.363.342
TOTAL BELANJA MENGIKAT		5.808.422.567.756	5.413.845.222.341
II. BELANJA WAJIB			
1.	Belanja Pendidikan (di luar Belanja Mengikat 1.2.7.8.9.10.11.12)	638.508.829.668	657.704.338.668
2.	Belanja Kesehatan (di luar Belanja Mengikat 1.2.7.8.9.10.11.12.15.16)	120.678.514.191	53.675.260.421
3.	Belanja Inspektoral (Pengawasan) 0.3 % (di luar B.Mengikat 1.2.7.8.9.10.11)	21.838.214.268	21.691.480.268
4.	Belanja BFSMD (Peningk. SDM ASN) 0.34 % (di luar B.Mengikat 1.2.7.8.9.10.11)	30.051.428.772	20.254.888.772
5.	Belanja Bagi Hasil	2.240.000.000.000	2.607.751.500.000
6.	Penyertaan Modal ke BUMD	249.856.920.000	249.856.920.000
TOTAL BELANJA WAJIB		3.300.933.906.899	3.610.934.388.129
TOTAL BELANJA WAJIB + MENGIKAT (I + II)		9.109.356.474.655	9.024.779.610.470

No.	URAIAN	APBD 2021 (Rp)	RKPD 2022 (Rp)
1.	PENDAPATAN	9.590.400.000.000	11.001.164.310.745
2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-
3.	Sisa Lebih Rill Perhitungan Anggaran	2.275.642.920.000	-
TOTAL PENERIMAAN		11.866.042.920.000	11.001.164.310.745
<i>Dikurangi:</i>			
4.	Belanja & Pengeluaran Pembiayaan yg Wajib & Mengikat	9.109.356.474.655	9.024.779.610.470
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN		2.756.686.445.345	1.976.384.700.274

1. Kebijakan fiskal pada tahun 2022 diharapkan masih memberikan stimulus terhadap perekonomian (kebijakan fiskal akomodatif) karena:

- Tahun 2022 merupakan momentum untuk ekonomi tumbuh tinggi, dan masih memerlukan dorongan dari sisi fiskal.
- Sektor swasta belum sepenuhnya pulih (belum kembali sepenuhnya ke periode sebelum krisis), karena paska krisis biasanya pemulihan sektor swasta terjadi secara bertahap.
- Tahapan awal transformasi ekonomi paska COVID- 19, sehingga dorongan dari sisi pemerintah masih diperlukan.
- Kebijakan fiskal akomodatif akan memberikan sinyal positif terhadap pasar, dan memberikan kepercayaan bagi investor untuk melakukan investasi.

2. Seiring dengan perbaikan perekonomian pada tahun 2022 karena pengendalian COVID-19 yang dilakukan pemerintah, maka pemerintah fokus kepada transformasi ekonomi dan dukungan terhadap penciptaan iklim investasi yang menarik investasi

@ bappedakaltim bappeda.kaltimprov.go.id

PAGU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2022

No	Perangkat daerah	Pagu Anggaran Tahun 2021				Pagu Indikatif Rancangan RENJA PD Tahun 2022 (Rp)			
		Belanja Mengikat Operasional Kantor (Rp)	Belanja Wajib dan Mengikat (Termasuk Kolom 3) (Rp)	Total Pagu Anggaran 2021 (Termasuk Kolom 4) (Rp)	Ruang Pendanaan Untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan PD (Rp) (9) = (9A) + (9B) + (9C) + (9D)	Belanja Mengikat Operasional Kantor (Rp)	Belanja Wajib dan Mengikat (Termasuk Kolom 7) (Rp)	Total Pagu Indikatif 2022 (Termasuk Kolom 8) (Rp)	Ruang Pendanaan Untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan PD (Rp) (10) = (9A) + (9B) + (9C) + (9D)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	882.816.015.332	2.122.962.840.000	2.122.962.840.000	1.240.146.824.668	882.816.015.332	2.142.158.349.000	2.142.158.349.000	1.259.342.333.668
2	Dinas Kesehatan	40.259.799.286	175.949.872.000	175.949.872.000	135.690.072.714	40.259.799.286	126.048.484.384	126.048.484.384	85.788.685.098
3	RSUD A. Wahid Sjahranie di Samarinda	174.531.107.000	648.479.951.000	648.479.951.000	473.948.844.000	174.531.107.000	576.021.584.846	576.021.584.846	401.490.477.846
4	RSUD dr. Kanjoso Djafrowo di Balikpapan	106.368.962.000	364.376.647.000	364.376.647.000	258.007.685.000	106.368.962.000	373.676.647.000	373.676.647.000	273.507.685.000
5	Rumah Sakit Jwa Daerah Alpa Husada Mahakam	37.384.477.567	57.319.714.844	57.319.714.844	19.654.237.277	37.384.477.567	58.189.714.844	58.189.714.844	20.805.237.277
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	65.781.233.626	103.698.264.626	1.541.207.003.494	1.475.425.769.868	65.781.233.626	103.698.264.626	1.230.000.000.000	1.164.215.766.374
7	Satuan Polisi Pamong Praja	12.967.436.786	22.783.336.000	9.815.901.214	12.967.436.786	14.578.091.986	20.444.175.000	7.476.738.214	7.476.738.214
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.340.560.480	15.675.482.000	6.334.921.520	9.340.560.480	9.340.560.480	16.829.418.000	7.488.857.520	7.488.857.520
9	Dinas Sosial	31.790.764.509	63.253.581.905	31.462.817.398	31.790.764.509	31.790.764.509	69.253.581.905	37.462.817.398	37.462.817.398
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.890.610.025	55.469.880.232	20.579.370.207	34.890.610.025	34.890.610.025	51.116.750.000	16.226.138.975	16.226.138.975
11	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.583.866.189	9.583.866.189	23.035.617.000	13.451.750.811	9.583.866.189	21.000.000.000	11.416.133.811	11.416.133.811
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	41.111.813.453	45.211.813.453	110.419.447.000	69.307.635.547	41.111.813.453	113.414.042.000	72.302.228.547	72.302.228.547
13	Dinas Lingkungan Hidup	12.841.328.135	12.841.328.135	32.285.035.000	19.443.706.865	12.841.328.135	38.714.900.000	25.873.571.865	25.873.571.865
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	9.243.038.100	9.243.038.100	19.698.636.000	10.655.597.900	9.243.038.100	23.300.000.000	14.056.961.900	14.056.961.900
15	Dinas Perhubungan	20.447.330.024	62.892.443.000	42.245.112.976	20.447.330.024	20.447.330.024	65.000.000.000	34.552.669.976	34.552.669.976
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.123.617.567	11.123.617.567	29.570.574.564	18.965.957.897	11.123.617.567	28.368.552.000	17.244.934.433	17.244.934.433
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.824.705.490	11.824.705.490	24.493.197.000	12.668.951.510	11.824.705.490	29.417.141.000	17.992.435.510	17.992.435.510
18	Dinas Pemuda dan Olah Raga	20.273.155.816	20.273.155.816	122.142.899.232	122.142.899.232	20.273.155.816	20.273.155.816	50.395.257.949	50.395.257.949
19	Dinas Perputihan dan Kebersihan Daerah	19.723.945.583	19.723.945.583	27.201.673.000	9.307.627.417	19.723.945.583	28.566.745.383	9.292.527.417	9.292.527.417
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	25.054.307.776	36.864.607.776	80.927.997.000	55.873.689.224	25.054.307.776	61.332.386.000	56.278.048.224	56.278.048.224
21	Dinas Pariwisata	10.387.373.671	10.387.373.671	29.576.256.000	19.188.862.394	10.387.373.671	34.500.000.000	24.112.626.320	24.112.626.320
22	Dinas Perkebunan	15.841.972.136	18.184.168.136	54.524.471.000	36.862.498.864	15.841.972.136	50.000.000.000	34.158.027.864	34.158.027.864
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	17.156.660.119	17.156.660.119	59.483.945.000	42.327.284.881	17.156.660.119	57.179.547.000	40.022.886.881	40.022.886.881
24	Dinas Kehutanan	136.862.227.373	308.428.835.373	463.864.634.702	327.062.407.329	136.862.227.373	333.833.833.668	465.429.099.000	328.536.871.627
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	15.784.611.400	15.784.611.400	75.479.896.000	69.695.283.600	15.784.611.400	84.668.860.000	20.636.154.700	20.636.154.700
26	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	18.924.458.335	18.924.458.335	55.799.575.736	36.875.117.401	18.924.458.335	53.592.588.000	34.628.129.665	34.628.129.665
27	Sekretariat Daerah	99.342.180.150	99.342.180.150	285.385.368.352	186.043.182.202	99.342.180.150	268.000.000.000	168.657.819.850	168.657.819.850
28	Sekretariat DPRD	69.511.237.837	69.511.237.837	253.631.948.000	184.120.710.163	69.511.237.837	160.801.405.000	91.290.167.163	91.290.167.163
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.513.995.300	18.513.995.300	47.786.234.759	28.724.238.459	18.513.995.300	39.453.150.000	20.636.154.700	20.636.154.700
30	Badan Pengendalian Daerah	146.884.913.939	126.439.372.000	275.458.061.000	165.084.880.939	146.884.913.939	228.439.372.000	81.354.491.061	81.354.491.061
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.944.378.972	4.213.119.243.904	4.260.031.535.342	4.243.087.155.590	16.944.378.972	4.219.129.243.904	4.232.136.641.000	4.232.136.641.000
32	Badan Kepegawaian Daerah	15.500.127.765	15.500.127.765	46.568.661.000	31.068.533.235	15.500.127.765	15.500.127.765	36.733.208.235	36.733.208.235
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.313.141.228	44.364.570.000	44.364.570.000	30.051.428.772	14.313.141.228	34.568.030.000	20.254.888.772	20.254.888.772
34	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.317.131.957	19.558.862.000	8.241.760.043	11.317.131.957	11.317.131.957	19.000.000.000	7.682.868.043	7.682.868.043
35	Badan Penghubung Provinsi	3.845.675.000	14.137.890.000	10.292.215.000	3.845.675.000	3.845.675.000	15.000.000.000	11.154.325.000	11.154.325.000
36	Inspektoral	17.308.519.732	39.146.734.000	39.146.734.000	21.838.214.268	17.308.519.732	39.000.000.000	21.691.480.268	21.691.480.268
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.900.939.138	11.282.802.976	19.695.186.938	10.794.247.800	8.900.939.138	11.282.802.976	11.099.060.862	11.099.060.862
38	DID (tensebar)	37.454.311.000	0	0	0	37.454.311.000	0	0	0
Jumlah		2.214.237.619.576	8.859.499.554.655	11.616.186.000.000	2.232.457.586.576	8.774.822.690.470	11.001.164.310.744	249.856.920.000	9.024.779.610.470
Penyerahan Modal (pengeluaran pembiayaan)									
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat									

Keterangan :

- Belanja Pendidikan (Dinkes) pada proposal 19,47% dari Total Belanja Daerah, dan dapat bertambah apabila memperhitungkan tagihan Belanja Pendidikan di meletak pada PO lain
- Belanja Kesehatan (Dinkes dan RSUD) pada proposal 10% dari Total Belanja Daerah, dan dapat bertambah apabila memperhitungkan rencana lanjutan pembangunan Ruang Isolasi RKSD, RSUD KORPRI, RS Mata, dll
- Untuk Pagu Anggaran/Indikatif yang ada di Dinkes, Dinkes, BFSMD, dan Inspektoral, nilai yang sama dengan Belanja Wajib dan Mengikatnya karena masuk kategori pembiayaan yang sudah diatur besar proporsinya (wajib dan mengikat)
- Nilai Kolom (3) dan Kolom (7) berasal dari komponen belanja nomor 1-11 pada belanja mengikat Tabel 2 (minimal harus dipenuhi untuk operasional kantor)
- Nilai Kolom (4) dan Kolom (8) berasal dari seluruh komponen Wajib dan Mengikat pada Tabel 2

